

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Maraknya ancaman *cybercrime* di Indonesia tentu memerlukan perhatian yang khusus dalam mengembangkan *national cybersecurity*, melihat kenyataan bahwa tingkat *cybercrime* di Indonesia sudah mencapai tahap memprihatinkan. Pentingnya pembentukan lembaga penegak hukum negara yang tegas dan mampu menangani segala macam bentuk tindak kejahatan siber menjadikan Indonesia terus berupaya meminimalisir kasus terkait dengan menciptakan Undang-undang dan menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Karena itu, Indonesia memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Australia dalam upayanya meningkatkan *cybersecurity* Indonesia. Hal ini dipengaruhi karena posisi Australia yang merupakan negara tetangga sekaligus menjadi negara dengan tingkat keamanan *cyber* yang cukup baik. Dalam pandangan teori kerjasama internasional, Indonesia dan Australia terlihat memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dalam bidang hukum dan keamanan nasional. Setiap negara pasti akan selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya masing-masing, namun tidak jarang pula ada negara-negara yang merasa tidak mampu dalam mewujudkan kepentingannya tersebut. Maka dari itu, diperlukannya suatu kerjasama internasional guna dapat merealisasikan kepentingan nasionalnya dengan mudah.

Oleh karenanya, tindakan yang diputuskan Indonesia dan Australia merupakan salah satu tindakan yang tepat untuk dilakukan, mengingat kepentingan dan tujuan dari kedua negara yang sama-sama ingin memperkuat sistem keamanan

negara dalam menghadapi ancaman *cybercrime* yang memungkinkan mengalami peningkatan di era serba digital ini. Kinerja pemerintah Australia yang tegas dan tertib juga menjadi salah satu alasan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan atau MoU perihal kerjasama *cyber*, Indonesia dan Australia sepakat untuk saling memberikan bantuan dan dukungan agar dapat mencapai tujuan yang diharap. Berdasarkan pada MoU, terdapat beberapa lingkup kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, diantaranya :

1. **Berbagi Informasi dan Praktik Terbaik** : direalisasikan oleh Polri dan AFP selaku lembaga penegak hukum dari masing-masing negara yang saling memberikan bantuan dan dukungan berupa pelatihan, pembangunan sarana berbagi informasi dan pengetahuan seputar teknologi dan *cyber*. Terbukti dengan dibangunnya gedung Transnational Crime Coordination Centre (TNCC) dan Laboratorium Cybercrime Investigations Satellite (CCIS) sekaligus berbagi pengetahuan tentang cara menindaklanjuti kasus *cybercrime* berbasis teknologi agar mempermudah proses investigasi.
2. **Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Koneksi** : pada lingkup ini pemerintah Indonesia maupun Australia belum terbukti memberikan kesempatan bagi anggota personil yang bekerja di bidang *cyber* atau teknologi untuk mengembangkan dirinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi supaya negara memiliki anggota yang hebat dan mampu dalam menangani serta meminimalisir ancaman *cybercrime*.

3. **Ekonomi Digital** : lingkup ini masih sejalan dengan dukungan praktik terbaik namun juga ditujukan untuk mempromosikan ekonomi digital yang aman. Hal ini cukup direalisasikan dengan bantuan dana yang diberikan Australia guna meningkatkan pertahanan keamanan *cyber* di Indonesia.
4. **Cybercrime** : dalam lingkup ini direalisasikan masing-masing negara untuk saling berbagi informasi perihal kebijakan hukum dan undang-undang yang dipakai dalam memerangi ancaman *cybercrime* yang terus berkembang.

Selain itu, adapula program *cyber policy dialogue* yang dijadikan sebagai forum diskusi tahunan dengan membahas segala informasi dan pengetahuan tentang *cyber* dan teknologi serta mengevaluasi hasil kerjasama yang telah dilakukan. Bagi Indonesia, program ini cukup memberikan dampak positif dalam menunjang tingkat kinerja para anggota peserta, terkhusus Polri dan BSSN. Dengan mendapat berbagai pelatihan mulai dari investigasi, penggunaan teknologi canggih dan juga keterampilan. Namun, nyatanya masih ada beberapa faktor internal yang menjadikan ancaman *cybercrime* di Indonesia masih dapat terus meningkat setiap tahunnya. Seperti masih ada banyak kasus penipuan online yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan berbagai macam alasan. Maka dari itu, penting untuk terus ditingkatkannya program *dialogue* ini guna dapat mengevaluasi dan memberikan solusi praktik terbaik perihal penanganan kasus *cybercrime* yang lebih baik dan bias diterapkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.